**Jambura Accounting Review**
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar
E-ISSN 2721-3617

# *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo*

***Lukfiah Irwan Radjak[a], Yuwin Ali[b], Fitriyanty Djafar[c]***
*[a] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, lukfiahradjak@umgo.ac.id*
*[b] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yuwinali@umgo.ac.id*
*[c] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, fitridjafar53@gmail.com*

INFO ARTIKEL

***Riwayat Artikel:***
*Received*
*Revised*
*Accepted*

***Kata Kunci:*** SPI, SAP, Kualitas Laporan Keuangan

**Keywords:** *SPI, SAP, Quality of Financial Reports*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan ditandai pada hasil signifikansi dibawah 0.05, Hasil pengujian secara simultan juga menunjukan bahwa secara bersama-sama Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh sebesar 78.10% untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

ABSTRACT

*This research was conducted at the Gorontalo Province Financial Agency. The aim of this research was to determine the influence of the Internal Control System and Government Accounting Standards.This research uses quantitative methods.The results of this research partially show that the Internal Control System and Government Accounting Standards have a significant effect on the Quality of Financial Reports, marked by a significance result below 0.05. Simultaneous test result also show that together the internal control system and government accounting standards have an influence of 78.10% to produce quality financial reports.*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, menuliskan upaya untuk pertanggung jawaban atas wewenang yang diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transaparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Merliana, 2020).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Perspektif Islam menjelaskan pencatatan informasi laporan keuangan merupakan kegiatan muamalah yang mempunyai makna segala kegiatan yang diakukan dalam rangka perbaikan hubungan antar sesama manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan dunia. Salah satu kegiatan muamalah ialah pencatatan keuangan atau yang sering disebut dengan Akuntansi. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Dearah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan terarah. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Ramanda (2015) mengartikan bahwa penerapan SAP berbasis akrual adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah.

Di Provinsi Gorontalo sendiri dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo hasil audit laporan keuangan oleh BPK untuk pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2019-2023 menunjukan hasil yang baik, yang ditandai dengan pemberian opini WTP dari BPK, Hal ini membuktikan adanya keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akan tetapi BPK menambahkan catatan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tentang adanya kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa pengawasan dari inspektorat yang masih kurang terkait masalah administrasi yaitu tagihan-tagihan yang sering terlambat dan juga kesalahan penyajian laporan keuangan,serta sumber daya manusia (SDM) yang ada di SKPD masih kurang menaati peraturan terkait penerapan SAP, masalah in tentunya tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah daerah karena akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meliana (2020) bahwa sumber daya manusia pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Bahri (2016) laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, harus dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian (2018) penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan.

Kedua penelitian tersebut mengartikan betapa pentingnya sumber daya manusia dan standar akuntansi permerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, laporan keuangan yang berkualitas memang menjadi harapan setiap lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menggunakan SDM yang tepat untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan guna mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Akuntansi Sektor Publik

Pengertian sektor publik sangatlah luas karena masing-masing disiplin ilmu memiliki definisi sendiri. Definisi sektor publik dari sudut pandang ekonomi yaitu suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana

masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya (Bastian 2019).

B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan adalah catatan akuntansi suatu entitas pada suatu peride akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transakti yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan sebagai informasi. Laporan keuangan pemerintah ditunjukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Kasmir (2020) menjelaskan, Laporan keuangan merupakan laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang terjadi saat ini atau periode yang akan datang. Laporan keuangan terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba-rugi dari hasil operasi perusahaan dengan laporan yang berkaitan dengan perubahan ekuitas pada suatu perusahaan (Munawir, 2020). Sedangkan menurut Sutrisno (2019), laporan keuangan merupakan sebuah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama (neraca dan laporan laba-rugi), yang disusun dengan tujuan untuk penyedia informasi keuangan pada perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Dari pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu catatan yang diperlukan oleh setiap entitas dalam menyajikan pertanggungjawaban penggunaan dana, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang mempunyai fungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara pihak intern (perusahaan) dengan pihak ekstern atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.

C. Kualitas Laporan Keuangan

Suwardjono, (2014) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau ringkasan dari transaksi keuangan pada suatu perusahaan. Kualitas pelaporan keuangan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. Pelaporan keuangan dikatakan tinggi atau berkualitas jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang. Kualitas laporan keuangan dilihat dari data yang dicatat sehingga membentuk laporan keuangan, setiap aliran transaksi

dilakukan pencatatan. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan dicatat dengan komponen laporan keuangan dan standar akuntansi yang benar.

Dari definisi Kualitas Laporan Keuangan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah dapat dikatakan berkualitas apabila dalam pelaporannya memuat informasi yang dapat dipahami secara luas oleh pihak ketiga, yang didukung oleh tata kelolah baik pihak internal maupun eksternal.

D. Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2015) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2019) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyususun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyususun dan menyajikan laporan keuangan, Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

**$H_2$:** Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
**$H_0$ :** Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

E. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut Scott (2014) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan

pengendalian telah dicapai. Menurut Jusup (2014), Sistem Pengendalian Internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ini sering disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas, Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu sistem pengawasan dan penanganan yang diimplementasikan oleh manajemen perusahaan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas operasi bisnis, berjalan dengan semestinya serta meminimalisir risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan bisnis.

**$H_1$:** Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

**$H_0$** : Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan r berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Adapun variable bebas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendali internal (X1) dan standard akuntansi pemerintahan (X2).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah badan keuangan Provinsi Gorontalo dan SKPD Provinsi Gorontalo sebanyak 33 (tiga puluh tiga). Serta pengambilan sampel dalam penelitian ini karena data berupa data primer dan sekunder maka menggunakan metode *purposive sampling* sehingga hanya beberapa populasi menjadi sampel atau objek penilaian dalam sebuah penelitian ini, karena peneliti hanya mencari sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh keterangan-keterangan untuk kelengkapan dalam penelitian agar dapat memecahkan masalah atas penelitian terkait. Peneliti berusaha mendapatkan berbagai informasi untuk dijadikan sebagai teori dan acuan, Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*libery research*) yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Menganalisis permasalahan yang diwujudkan dengan data yang dapat dijelaskan dengan cara kuantitatif. Data yang diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden . Hasil dari data yang telah terkumpul melalui kuesioner diklasifikasikan dengan cara menetapkan skor jawaban dari pertanyaan atau pernyataan yang telah dijawab oleh responden dengan menggunakan skala likert. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi, dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan

rata-rata data sampel atau populasi dan pada penelitian menggunakan teknik analisis regresi. Pengolahaan data analisis regresi linear ini dibantu dengan perangkat SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 25 untuk kemudahan dalam perhitungan.

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi logistik. Dalam statistika uji regresi logistik ini digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokan data pada fungsi. logit kurva logistik. Metode ini merupakan model linier umum yang digunakan untuk regresi binomial. Seperti analisis regresi pada umumnya, metode ini menggunakan beberapa variabel prediktor, baik numerik maupun kategori. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%). Selanjutnya dengan menggunakan hipotesis ststistik peneliti menggunakan uji koefisien detrminasi (R2) dan uji t.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian Ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dengan menggunakan data Sistem Pegendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Independent dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependent. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) data Kuesioner yang dibagikan, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS Versi 28. Berikut tabel tingkat pengembalian kuesioner :

*Tabel 1. Pengukuran Kuesioner*

| Keterangan | Jumlah | Presentase |
|---|---|---|
| Jumlah Kuesioner Yang Disebar | 33 | 100% |
| Jumlah Kuesioner Yang Tidak Kembali | 0 | 0% |
| Jumlah Kuesioner Yang Dapat Dianalisis | 33 | 100% |
| Jumlah Kuesioner Yang Tidak Di Isi | 0 | 0% |

Sumber: *Olah Data, 2024*

*Tabel 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin*

| Jenis Kelamin | Jumlah Responden (Orang) | Presentasi (%) |
|---|---|---|
| Laki-laki | 13 | 41% |
| Perempuan | 20 | 59% |
| Jumlah | 33 | 100% |

Sumber: *Olah Data, 2024*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat tingkat presentasi responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari yang berjenis kelamin laki-laki.

*Tabel 3. Responden Berdasarkan Usia*

| Usia (Tahun) | Jumlah Responden (Orang) | Presentasi (%) |
|---|---|---|
| 20-30 Tahun | 8 | 24% |
| 31-40 Tahun | 14 | 44% |
| 41-50 Tahun | 11 | 32% |
| Jumlah | 33 | 100% |

Sumber: *Olah Data, 2024*

Berdasarkan data tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak ada pada usia 31 > 40 tahun yakni sebanyak 44% .

*Tabel 4. Rentang Skala*

| Rata-rata Skor | Presentase Skor | Kriteria |
|---|---|---|
| 1 – 1,99 | 20,00%- 40,00% | Tidak Baik |
| 2 – 2,99 | 40,01%- 60,00% | Cukup Baik |
| 3 – 3,99 | 60,01- 80,00% | Baik |
| 4 – 4,99 | 80,01- 100,00% | Sangat Baik |

Sumber: (*Kuncoro, 2017*)

*Tabel 5. Statistik Deskriptif*

| | | | N | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SPI | 33 | 6 | 16 | 13.91 | 2.255 |
| SAP | 33 | 6 | 8 | 7.21 | .960 |
| Kual Lap. Keuangan | 33 | 12 | 16 | 13.94 | 1.819 |
| Valid N (listwise) | | | 33 | | |

Sumber: *Olah Data SPSS V.28, 2024*

Jika melihat pada data tabel diatas sistem pengendalian internal memiliki nilai minimum 6 dan maksimum 16 dengan rata-rata 13.91 dengan standar deviasi 2,255 dengan melihat data tersebut ini menunjukan bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibanding standar deviasi yang merupakan representasi yang baik dalam menggambarkan data kekuatan Sistem Pengendalian Internal. Dapat dilihat pada tabel diatas Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai minimum 6, nilai maximum 8 dengan rata-rata 7.21 dengan standar deviasi 0.960 dengan melihat data tersebut ini menunjukan bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibanding standar deviasi yang merupakan representasi yang baik dalam menggambarkan data kekuatan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai minmum 12, nilai maximum 16 dengan rata-rata 13.94 dengan standar deviasi 1.819 dengan melihat data tersebut ini menunjukan bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibanding standar deviasi yang merupakan representasi yang baik dalam menggambarkan data kekuatan Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data dari nilai minimum, maximum, mean, dan standart deviation dari variabel penelitian yang dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Sistem Pengendalian Intenal

*Tabel 6. Persepsi Responden Terkait Variabel Sistem Pengendalian Internal*

| | Alternatif Jawaban | | | | | Mean | F % | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | N | | | |
| 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | | 3,58 | 71,7 | Baik |
| 2 | 1 | 0 | 10 | 22 | 33 | 3,58 | 71,7 | Baik |
| 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | 33 | 3,26 | 65,3 | Baik |
| 4 | 1 | 0 | 16 | 16 | 33 | 3.41 | 68,3 | Baik |
| Variabel X1 Sistem Pengendalian Internal | | | | | | 3.45 | 69.1 | Baik |

Sumber: *Data Diolah, 2024*

Dari tabel 6 diatas tentang persepsi responden terkait variabel Sistem Pengendalian Internal yang memiliki 4 item pertanyaan yang termuat dalam kuisioner yang sudah dibagikan kepada 33 responden. Dari hasil pengukuran indeks persepsi nilai rata-rata untuk 4 pertanyaan sebesar 3.45 dengan presentasi sebesar 69.1% dan berada dikriteria baik yang berarti cocok untuk digunakan dalam upaya peningkatan Kualitas Laporan Keuangan yang ada di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

### 2. Standar Akuntansi Pemerintah

*Tabel 7. Persepsi Responden Terkait Variabel Standar Akuntansi Pemerintah*

| | Alternatif Jawaban | | | | N | Mean | F% | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 3,59 | 72 | Baik |
| 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 3,59 | 72 | Baik |
| Variabel X2 Standar Akuntansi Pemerintah | | | | | | 3.59 | 72 | Baik |

Sumber: *Data Diolah, 2024*

Dari tabel 7 diatas tentang persepsi responden terkait variabel Standar Akuntansi Pemerintah yang memiliki 2 item pertanyaan yang termuat dalam kuisioner yang sudah dibagikan kepada 33 responden. Dari hasil pengukuran indeks persepsi nilai rata-rata untuk 2 pertanyaan sebesar 3.59 dengan presentasi sebesar 72% dan berada dikriteria baik yang berarti Standar Akuntansi Pemerintah cocok untuk diterapkan dan dijadikan acuan dalam proses pembuatan laporan keuangan dalam upaya peningkatan Kualitas Laporan Keuangan yang ada di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

### 3. Kualitas Laporan Keuangan

*Tabel 8. Persepsi Responden Terkait Variabel Kualitas Laporan Keuangan*

| | Alternatif Jawaban | | | | N | Mean | F % | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 3,47 | 69,5 | Baik |
| 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 3,47 | 69,5 | Baik |
| 3 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | 3,50 | 71.9 | Baik |
| 4 | 1 | 0 | 18 | 15 | 33 | 3.44 | 68,9 | Baik |
| Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan | | | | | | 3.47 | 69.5 | Baik |

Sumber: *Data Diolah, 2024*

Dari tabel 8 diatas tentang persepsi responden terkait variabel Kualitas Laporan Keuangan yang memiliki 4 item pertanyaan yang termuat dalam kuisioner yang sudah dibagikan kepada 33 responden. Dari hasil pengukuran indeks persepsi nilai rata-rata untuk 4 pertanyaan sebesar 3.47 dengan presentasi sebesar 69,5% dan berada dikriteria baik yang berarti Kualitas laporan keuangan mempunyai peran yang penting dalam pemanfaatan laporan keuangan.

## A. Pengujian Analisis

1. Uji Validitas

*Tabel. 9 Hasil Uji Validitas Variabel X*

| No | R Hitung | R Tabel | Ket. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,880 | 0.3440 | Rhitung>Rtabel | Valid |
| 2 | 0,880 | 0.3440 | Rhitung>Rtabel | Valid |
| 3 | 0,671 | 0.3440 | Rhitung>Rtabel | Valid |
| 4 | 0,926 | 0.3440 | Rhitung>Rtabel | Valid |
| 5 | 0,968 | 0.3440 | Rhitung>Rtabel | Valid |
| 6 | 0,968 | 0.3440 | Rhitung>Rtabel | Valid |

Berdasarkan pengujian validitas pernyataan di atas, dari 6 pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari variabel Sistem Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi Pemerintahan ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

*Tabel. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Y*

| Var. | Koef. Reliabel | Angka Acuan | Ket. | Status |
|---|---|---|---|---|
| SPI | 0,855 | 0,6 | Nilai *Cronbah Alpa* > nilai 0,6 | Reliabel |
| SAP | 0,932 | 0.6 | Nilai *Cronbah Alpa* > nilai 0,6 | Reliabel |

Berdasarkan pengujian validitas di atas untuk mengukur validitas dari variabel Kualitas Laporan Keuangan ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

**2. Uji Reabilitas**

*Tabel. 11 Uji Reliabilitas Variabel X*

| Var. | Koef. Reliabel | Angka Acuan | Ket. | Status |
|---|---|---|---|---|
| SPI | 0,855 | 0,6 | Nilai *Cronbah Alpa* > nilai 0,6 | Reliabel |
| SAP | 0,932 | 0.6 | Nilai *Cronbah Alpa* > nilai 0,6 | Reliabel |

Sumber : Data Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik *alpha croncbach* sebagaimana yang disajikan pada tabel diatas untuk variabel Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan diperoleh nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar dari angka acuan.

*Tabel. 12 Uji Realibilitas Variabel Y*

| Variabel | Koef | Angka Acuan | Ket. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kualitas Laporan Keuangan | 0,919 | 0,6 | Nilai *Cronbah Alpa* > 0,6 | Reliabel |

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik *alpha croncbach* sebagaimana yang disajikan pada tabel diatas untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0.919. Nilai koefisien *Cronbach's Alpha* tersebut lebih besar dari nilai patokan yang telah ditentukan yaitu 0.6.

**B. Analisis Regresi**

*Tabel. 13 Hasil Uji Analisis Regresi*

| Model | Coefisien | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unstandar | | Standar | T | Sig. |
| | B | Std Error | Beta | | |
| 1 | Constan | 1.820 | 1.214 | | 1.499 |
| | SPI | .262 | .098 | .325 | 2.667 |
| | SAP | 1.174 | .231 | .620 | 5.082 |
| a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keuangan | | | | | |

Sumber: Olah Data SPSS V.28, 2024

Berdasarkan hasil analisis diatas, model regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = 1.820 + 0.262\ X_1 + 1.174\ X_2 + e$$

*Tabel. 14 Hasil Uji T*

| Coefisien | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Model** | **Unstandar** | | **Stan-dar** | **T** | **Sig.** |
| | **B** | **Std Error** | **Beta** | | |
| 1 | Constant | 1.820 | 1.214 | | 1.499 |
| | SPI | .262 | .098 | .325 | 2.667 |
| | SAP | 1.174 | .231 | .620 | 5.082 |

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keuangan

Sumber: Olah Data SPSS V.28, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa t-hitung Sistem Pengendalian Internal sebesar 2.667 dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 5.082 sedangkan nilai dari t-tabel hanya sebesar 2.042 yang berarti bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel, dilihat juga dari nilai signifikansi dimana hasil uji T menunjukan tingkat signifikan dibawah 0.05, artinya bahwa variabel bebas Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, peryataan tersebut mengidikasikan bahwa Hipotesis H1 dan H2 diterima.

*Tabel. 15 Hasil Uji F*

| | **Model** | **Sum** | **df** | **Mean** | **F** | **Sig** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 85.537 | 2 | 42.769 | 55.260 | .000[b] |
| | Residual | 23.992 | 31 | .774 | | |
| | Total | 109.529 | 33 | | | |

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keuangan

b. Predictors: (Constant), SAP, SPI

Sumber: Olah Data SPSS V.28, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa f-hitung dari variabel bebas yang diuji secara bersamaan sebesar 55.260 sedangkan nilai dari f-tabel hanya sebesar 3.32 yang berarti bahwa f-hitung lebih besar dari f-tabel, dilihat juga dari nilai signifikansi dimana hasil uji F menunjukan tingkat signifikan dibawah 0.05, artinya bahwa variabel bebas pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, peryataan tersebut mengidikasikan bahwa Hipotesis H1 dan H2 diterima

## C. Koefisien Determinasi

*Tabel. 16 Koefisien Determinasi*

| **Model** | **R** | **R Square** | **Adjusted R Square** | **Std. Error of the Estimate** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .879[a] | .773 | .758 | .894 |

a. Predictors: (Constant), SAP, SPI

b. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keuangan

Sumber: Olah Data SPSS V.28, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari $R_{square}$ sebesar 0.773 artinya bahwa variabel bebas memiliki pengaruh sebesar 77.30% terhadap variabel terikat. Ini artinya bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil peneltian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya pengujian data dengan bantuan SPSS melalui hasil uji analisis regresi, hasil uji t dan uji f ketiga pengujian tersebut menunjukan hasil yang memiliki pengaruh positif. Nordiawan (2019) juga pernah menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah yakni Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan dilingkup pemerintahan baik pusat atau daerah berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya untuk bisa meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan daerah. Pernyataan tersebut tentunya perlu menjadi perhatian bagi Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk memperbaiki temuan yang menjadi catatan BPK yakni sumber daya manusia yang ada di SKPD masih kurang menaati peraturan yang terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, karena hal tersebut berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tujuan utama Standar Akuntansi Pemerintahan adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*).

Penelitian ini juga sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Hermawan (2022), Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya.

**2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada pengujian model analisis regresi maupun dari hasil pengujian secara parsial (uji t) dan secara simultan (uji f), dari hasil tersebut masing-masing menunujukan hasil yang berpengaruh positif. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah,

dinas-dinas yang ada diprovinsi Gorontalo dituntut untuk meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal dilingkungan kerja. Ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi Gorontalo khususnya Badan Keuangan Provinsi Gorontalo agar memperbaiki temuan dari BPK yang menyimpulkan bahwa masih terdapat kurangnya pengawasan dari Sistem Pengendalian Internal yang mengkibatkan lemahnya penyajian laporan keuangan, sebagaimana diketahui jika pengendalian internal lemah maka indikasi kecurangan atau ketidakakuratan dalam proses akuntansi menjadi tidak terkontrol.

Hasil yang diuji oleh peneliti ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susilawati (2014) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah .

**3. Kualitas Laporan Keuangan**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Baridwan (2016) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Kualitas Informasi yang harus ada dalam laporan keuangan sektor publik menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah dapat dipahami, relevansi, keterandalan, dan dapat diperbandingkan.

Hal tersebut mengartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki peran dalam setiap proses pencatatan, ringkasan, dan transaksi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tak hanya itu karena laporan keuangan yang disajikan juga harus dapat dipahami maka dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan setiap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan di tiap-tiap daerah memiliki format yang sama. Oleh karena Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan sama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka pemerintah daerah provinsi Gorontalo khususnya Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dapat mengkolaborasikan antara Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, agar apa yang menjadi catatan BPK pada audit 2023 dapat diperbaiki oleh pemerintah daerah.

**4. Faktor Lain**

Dari hasil pengujian yang dilakukan secara simultan atau bersamaan 78.10% Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahaan, artinya masih tersisa 21.90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijadikan indikator dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2022), kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan membutuhkan kompetensi Sumber Daya Manusia agar laporan keuangan yang disususun memenuhi kualifikasi informasi. Penelitian tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah juga dilakukan oleh Anggreni, dkk (2018), Seperti yang dikemukakan Wibowo (2017) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Veithzal (2014) juga menyebutkan, kompetensi adalah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten yang berarti cakap, mampu, terampil. Kompetensi mengacu kepada atribut/ karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian menunjukan secara parsial Sistem Pengendalian Internal memiliki dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan ditandai pada hasil signifikansi dibawah 0.05, Hasil pengujian secara simultan juga menunjukan bahwa secara bersama-sama Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh sebesar 77.30% untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada badan keuangan di provinsi Gorontalo, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh instansi pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik organisasi dan tata kelola yang berbeda.

C. Saran

1. Bagi Instansi

   Badan keuangan Provinsi Gorontalo disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi guna menunjang kualitas laporan keuangan

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan wilayah dan menambahkan variable lain seperti budaya organisasi atau peran audit internal untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku** :

Al-Qur'an . *Surat At-Taubah* : Ayat 119

Halim, A ., dan Muhammad Syam Kusufi. 2017. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah*. Jakarta : Salemba Empat.

Arikunto, S. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Bahri, S. 2016. *Pengantar Akuntansi. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Bastian, I. 2019. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2.* Jakarta : Salemba Empat.

Bawhede, H. V. 2014. *What Factors Influence Financial Statement Quality-A Framework and Some Empirical Evidence*. Penerjemah : Rivandi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Baridwan, Z. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : BPFE.

Munawir, S. 2020. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty.

Fahmi, I. 2022. *Analisis Kinerja Keuangan.* Bandung : Alfabeta.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A ., dan Mamduh M. Hanafi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 : Penyajian Laporan Keuangan* . Jakarta : IAI

Jusup, A. Haryono. 2014. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1.* Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

Kasmir. 2020. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 1. Cetakan ke-6, Jakarta : Rajawali Pers.

Mahmudi. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit UII Press.

Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik* : *Penentuan harga pelayanan publik*, Yogyakarta : Salemba Empat.

Muchlis ., dan Iskandar 2017. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.

Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi. Edisi keempat.* Jakarta : Salemba Empat.

Nordiawan, D . 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Romney, Marshall B ., dan Steinbert, Paul J. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.

Sirait, P. 2014. *Pelaporan dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Saidin, O . K. 2014. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*, Jakarta : Rajawali Pers.

Scott, J . 2014. *Sistem Pengendalian Internal. Edisi keenam.* Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu YPKN.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : penerbit Alfabeta.

Sutrisno. 2019. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : EKONISIA.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi (Perekayasaan Pelaporan Keuangan) Edisi Ketiga.* Yogyakarta : BPFE.

Veithzal, R . 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Prasada.

**Skripsi :**

Badjuri, A ., Dan Elisa Trihapsari 2014, Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah. Semarang

Dian, N H., dkk. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda

Imelda. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud

McDaniel, B.A. (2022). "*Entrepreneurship and Innovation : An Economic Approach*". M.E. Sharpe. Inc, New York.

Merliana. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mulia, Rizki Afri. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)

Safitri, N. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sukmaningrum, T. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Susilawati, 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Windiastuti. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada DPPKAD Kota Bandung). Skripsi Universitas Widyatama Bandung.

**Jurnal :**

Anggreni, N. M. M., Widanaputra, A. A. G. P., dan Putri, I. G. A. D. 2018. Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 22 (1) : 352-380.

Ayuningsih, L., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. 2022. Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11 (04) : 250-253.

Aziyah, W., dan Yanto, H. 2022. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. Owner : *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6 (1) : 977-989.

Hermawan, A. R. 2022. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020. Humantech : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2 (2) : 304-315.

Kadek, W.D , Dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 2 (1) : 306-314.

Ramanda, R. S., & Indrahti, S. (2015). Analisis Pengelolaan Arsip Inaktif Terhadap Temu Kembali Arsip Di Pusat Arsip ( Record Center ). *Politeknik Negeri Semarang,* 4 (3) : 285-290.

Siregar, S. V., Amarullah, F., Wibowo, A., & Anggraita, V. (2015). Audit tenure, Auditor Rotation, and Audit Quality: The Case of Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 5 (1) : 55-74.

Winidyaningrum, C., & Rahmawati, 2019, "Pengaruh Sumber Daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII, Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 4 (1) : 225-229.

Xu , et al 2015. Understanding household waste separation behaviour: testing the roles of moral, past experience, and perceived policy effectiveness within the theory of planned behaviour. *Sustainability*. 9 (1) : 625.

**Pemerintah Republik Indonesia :**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan